

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan Negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.¹

Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar Negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia. Hindia Belanda adalah Negara modern pertama yang mewariskan tidak sedikit tradisi kelembagaan Republik Indonesia pasca-kemerdekaan, corak berokrasi

¹ Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 139

Indonesia amat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Belanda, karena mengedepankan pendekatan sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule). Belanda tetap mempertahankan simbol-simbol penguasa tradisional, tetapi pada saat yang sama memanfaatkan para pejabat pribumi dalam jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan, karena dipandang lebih murah ketimbang mendatangkan pejabat asli Belanda.²

Revolusi yang menjadi alat terciptanya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing dan untuk tatanan social yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa perang dunia II.³ Gerakan pemuda atau munculnya peranan pemuda dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu fenomena khas abad ke-20, kalau kita mengesampingkan golongan-golongan pemuda di sekitar seorang pangeran-mahkota di keraton Jawa atau di sekitaran anak-anak ulama,

² M Alfan Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 31

³Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Penerjemah Satrio Wahono (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 428

karena yang terakhir ini dapat dilihat lebih bersifat sebagai fraksi-fraksi politik tertentu.⁴ Meskipun Negara Republik Indonesia telah berhasil diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden pertama Ir. Sockarno dan Wakil Presiden Drs. Moch. Hatta, namun kenyataannya hingga berapa tahun setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut, pihak Belanda belum mau mengakui kehadiran Negara Bangsa yang baru lahir itu. Hal yang cukup teragis mengenai persoalan ini terutama setelah datangnya tiga devisi tentara sekutu di bawah pimpinan Sir Philp Christisson yang merupakan komandan SEAC (Shouth East Asia Command) yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI).⁵

Pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat politik pada tanggal 1 November 1945, dinyatakan dalam maklumat tersebut bahwa pemerintah Republik Indonesia dari Serikat maupun dari pihak Belanda yang dibuat atau di bawah komando dan kekuasaan Belanda sebelum Perang Dunia Kedua, berjanji akan mengembalikan seluruh milik pribumi yang telah dikuasai oleh pihak asing untuk kesejahteraan rakyat. Bersamaan dengan hal itu dikeluarkan pernyataan bahwa

⁴ Onghokham, *Rakyat dan Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983). h. 134

⁵Runalan, "Perundingan Roem-Roijen Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949", *Jurnal Artefak* Vol. 01 No.01 (Januari 2013), h. 69.

pemerintah menyukai berdirinya partai-partai politik sebagai sarana pembantu perjuangan. Sebagai realisasi dari maklumat tersebut kabinet presidential yang dipimpin oleh presiden sendiri diganti dengan kabinet ministeriai. Pemerintah yang baru ini segera mengadakan kontrak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris.⁶

Salah seorang pemuda yang saat itu menyadari bahwa kemerdekaan suatu bangsa adalah hak asasi yang tidak boleh dirampas adalah Mohamad Roem. Kesadaran Mohamad Roem itu timbul ketika menuntut ilmu di Hollandsch Inlandsche School (HIS) Temanggung tahun 1917, setelah itu dia melanjutkan sekolahnya ke School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) pada tahun 1924. Di sekolah inilah Mohamad Roem masuk organisasi kepemudaan yaitu Jong Jawa dan JIB. Jong Jawa yang dibentuk pada 12 juni 1918 adalah kelanjutan dari Tri Koro Dharmo (tiga tujuan mulia) yang berdiri pada tanggal 7 maret 1915, adapun JIB dibentuk pada tanggal 1 januari 1925.⁷ Perjuangan Mohamad Roem di berbagai organisasi kepemudaan telah membawanya masuk ke dalam dunia politik. Hal ini disebabkan di JIB sendirimembolehkan anggotanya untuk masuk ke dalam partai politik.

⁶Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Departemen P&K, 1975). Cet.Ke-01, Jilid ke-IV, h. 121

⁷lin Nur Isnawati, *Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya*, (Magelang: Yayasan Indonesiatera, 2002), h. 7.

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Mohamad Roem, dan ia mulai masuk menjadi anggota Partai Sarekat Islam Indonesia (PSI) pada tahun 1932, karena terjadi kemelut dalam partai PSII kemudian Mohamad Roem bersama Haji Agus Salim mendirikan Partai Penyardar. Dalam partai baru ini Mohamad Roem menjadi ketua komite *central executive*.⁸

Ketenaran Mohamad Roem disebabkan oleh perjuangannya baik pada masa sebelum ataupun setelah kemerdekaan Indonesia. Strategi utama yang dijalankan oleh Mohamad Roem adalah melalui meja perundingan. Mohamad Roem adalah seorang diplomat ulung, banyak pertemuan dan perundingan penting yang diikutinya, baik ersekala Nasional maupun Internasional, antara lain perundingan yang pernah diikuti oleh Mohamad Roem antara lain Perlindungan Linggarjati yang dilaksanakan oleh pihak Indonesia dan Belanda pada era Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947), penandatanganan perundingan Renville (17 Januari 1948), persetujuan Roem-Royen (14 April 1949), Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda (2 November 1949). Conference For Moeslim and

⁸ Soemarso Soemarsono, M. Ruem 70 Tahun Pejuang Perunding, (Jakarta: Bulan Bintang. 1987), h. 36.

Christian Cooperation di Iskandariah, Mesir (1955) dan berbagai perjalanan penting kebeberapa Negara.⁹

Mohamad Roem sebagai perunding (diplomat) memang menempati kedudukan yang khas dalam sejarah Negara Indonesia, walaupun kegiatannya dalam perundingan itu sudah sekaligus termasuk dalam rangkaian perjuangannya, masih perlu untuk mengemukakan Mohamad Roem sebagai perunding. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas dan dengan melihat kondisi yang banyak terjadi pada saat sekarang ini guna memberikan sebuah kontribusi yang baik bagi perkembangan perpolitikan di Indonesia maka penulis perlu untuk mengangkat tema skripsi yang berjudul "**Pemikiran Politik Mohamad Roem Dalam Kontelasi Perpolitikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan (1945-1957)**". Sebab perjuangan Mohamad Roem dalam menentukan langkah-langkah pemikiran strategi politik khususnya sebagai diplomat yang handal mempunyai peranan yang sangat penting, agar dapat kita pelajari dan menjadi seorang diplomat bukan hanya membawa diri sendiri, tetapi juga membawa nama negaranya agar senantiasa dihargai oleh Negara lain demi terciptanya suatu keadilan dan persamaan hak yang merata.

⁹Mohamad Roem, *Suka Duka Berunding dengan Belanda*, (Jakarta: Idayu Press, 1977), h. 10.

B. Fokus Penelitian

Agar dalam penelitian ini tidak meluas dan melebar, maka fokus dalam penelitian Pemikiran Politik Mohamad Roem dalam kontelasi Perpolitikan di Indonesia pasca Kemerdekaan (1945-1957) ini adalah sebagai berikut:

1. Membahas tentang pemikiran politik Mohamad Roem dalam kontelasi perpolitikan Indonesia 1945-1957.
2. Dasar teori pemikiran politik Mohamad Roem dalam kontelasi perpolitikan Indonesia 1945-1957.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pemikiran politik Mohamad Roem dalam kontelasi perpolitikan di Indonesia pasca kemerdekaan (1945-1957)?
2. Bagaimana peran pemikiran politik Mohamad Roem dalam kontelasi perpolitikan di Indonesia pasca kemerdekaan (1945-1957)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran politik Mohamad Roem dalam kontelasi perpolitikan di Indonesia pasca kemerdekaan (1945-1957).
2. Untuk mengetahui peran pemikiran politik Mohamad Roem dalam kontelasi perpolitikan di Indonesia pasca kemerdekaan (1945-1957).

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam peran dan pemikiran politik Mohamad Roem dalam kontelasi perpolitikan di Indonesia pasca kemerdekaan (1945-1957).

2. Praktisi

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna mahasiswa/mahasiswi, khususnya mengenai peran dan pemikiran politik Mohamad Roem dalam kontelasi perpolitikan di Indonesia pasca kemerdekaan (1945-1957).

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa objek yang digunakan, maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Judul Skripsi	Penulis	Hasil Penelitian
1	Mohamad Roem Peran Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan	Agus Parwanto/ UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007	1. Latar belakang kehidupan keluarga, pendidikan dan karya Mohamad Roem telah menjadikan dirinya menjadi seorang yang selalu membela kepentingan rakyat kecil dan juga telah memberikan manfaat yang besar bagi dunia pendidikan khususnya di Indonesia 2. Aktifitas Mohamad Roem dalam organisasi baik kepemudaan ataupun politik telah mengantarkannya menjadi menteri dalam berbagai

			<p>cabinet di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktifitas organisasi yang pernah diikuti Mohamad Roem.</p> <p>3. Perundingan yang pernah diikuti oleh Mohamad Roem telah memberikan arti hidup bagi dirinya maupun orang lain bahwa kemerdekaan Indonesia itu dicapai dengan jalan yang panjang, dan berkat jasa-jasa Mohamad Roem dan para pemimpin Indonesia yang lainnya dalam perundingan dengan Belanda itu menghasilkan kemerdekaan Indonesia yang berdaulat</p>
2.	Perjuangan Politik Mohamad Roem	Lusiana/ UIN Syarif Hidayatullah/2007	<p>1. Mohamad Rem adalah orang yang berjiwa nasionalis, yang sangat cinta terhadap bangsa dan tanah air Republik Indonesia, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan berdasarkan kecintaan terhadap tanah air. Selain itu juga bagi Mohamad Roem sosok Haji</p>

			<p>Agus Salim mempunyai peranan penting dalam menentukan langkah-langkah politik Mohamad Roem untuk selanjutnya.</p> <p>2. Mohamad roem sampai saat ini dikenal sebagai seorang pejuang dan perunding, karena pemikiran Mohamad Roem berorientasi sepenuhnya pada perjuangan bangsa Indonesia, yang menurut Mohamad Roem dari segi kehidupannya masih terbelakang karena adanya para penjajah. Perjuangannya dimulai atas beberapa decade yaitu pada masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan pada masa kemerdekaan. Selain itu juga perjuangan Mohamad Roem lakukan pada akhirnya membuahkan hasil yaitu keberhasilan Indonesia untuk mencapai kedaulatan penuh yang berhasil dicapai pada tanggal</p>
--	--	--	--

			<p>27 Desember 1949.</p> <p>3. Berawal dari pembenaran Dr. Amien Rais mengenai "Tidak Ada Negara Islam," Mohamad Roem sepakat dengan pendapat tersebut, menurutnya itu adalah sebuah pernyataan yang sangat bijaksana, dan lebih baik jangan dipakai karena banyak orang yang tidak menyukainya. Mohamad Roem mengakui bahwa ia belum pernah mengecek langsung dalam Al- Qur'an dan Hadist, karena Mohamad Roem berfikir semua itu adalah perbuatan yang sia-sia.</p>
3.	Mohamad Roem Seorang Pejuang Indonesia (1946-1949)	Septi Daru Kurniawati (2007),	<p>Sebagai seorang pejuang diplomasi, Mohamad Roem juga memberikan hasil karya yang gemilang bagi bangsa Indonesia. Hasil karya diplomat tersebut yakni suatu pernyataan Roem-Royen yang merupakan dokumen sejarah yang penting bagi kelanjutan</p>

			<p>tegaknya Republik Indonesia. Dengan demikian dokumen Roem- Royen menempati kedudukan yang khas yang dikenal oleh seluruh dunia. Ini pula yang telah menempatkan Mohamad Roem dalam deretan nama-nama diplomat dunia dengan hasil karya senafas dengan nama pribadi. Selain karyanya di atas, hasil perjuangannya dalam bidang pemerintah pasca KMB adalah menjadi menteri Negara tanpa portofolio pada era Kabinet Hatta</p>
4.	"Peranan Modamad Roem Dalam Bidang Diplomasi Di Indonesia tahun 1924-1968"	Nove Irovani Marbun/ Universitas Riau, Pekanbaru/ (2013)	<p>Hasil penelitian: perundingan yang diadakan sesudah kemerdekaan Indonesia yaitu dengan cara berdiplomasi antara Indonesia dan Belanda untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan kedaulatan. Salah satu tokoh yang sangat berperan aktif di dalamnya yakni</p>

			<p>Mohamad ROem yang berkedudukan sebagai anggota delegasi di Perundingan Linggarjati (1946) Perundingan Renville (1949), Mohamad Roem berkedudukan sebagai ketua delegasi bertujuan untuk mendapatkan kembali pemerintahan Republik Indonesia dan Ibu Kota Yogyakarta yang dikuasai oleh Belanda pada masa agresi militer Belanda II serta konferensi Meja Bundar (KMB) (1949) yang berperan sebagai ketua delegasi yang berpartisipasi memutuskan suatu keputusan yang bijaksana dalam perundingan KMB.</p>
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran, atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi (ukuran-

ukuran suatu permasalahan) sosial yang dianggap relevan (berhubungan) oleh penulis.¹⁰

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membangun kerangka berfikir dalam meneliti, membantu mendeskripsikan masalah secara mendalam dan jelas serta mengetahui keterkaitan antara masalah yang dikaji, untuk menganalisa penelitian ini. Pemikiran politik adalah bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam bidang politik, semenjak dari dahulu kala dimasa Yunani Kuno sampai ke masa sekarang. Politik pada umumnya lebih menunjukkan pada gambaran segai sebuah konflik. Politik sebagaimana yang dipergunakan dalam perbandingan bahwa politik merupakan sebuah proses pembuatan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Sistem politik Indonesia sangatlah beragam, dengan berbagai perkembangan yang terjadi selama sejarah bangsa ini. Indonesia memiliki system politik yang sangat unik untuk dikaji dan ditelaah dengan baik dan benar. Dan patokan sistem politik yang diambil adalah sistem politik pada masa pemerintahan Orde Baru.¹¹

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2004), h. 124.

¹¹ Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.1.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan, c) kemungkinan- kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan, d) kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory* dapat dibedakan menjadi dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara dua kelompok teori tidak bersifat mutlak.

1. Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik. Dengan adanya unsur norma-norma dan nilai ini maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai. Termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik sistematis, ideology dan sebagainya.
2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini bisa dinamakan teori non-valutional (value free) biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan

komparatif (perbandingan). Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.¹²

Secara esensial konsep pemikiran dan perjuangan adalah suatu usaha untuk mendekatkan diri secara penuh baik dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, dan budaya. Konsep ini tidak hanya dimaksudkan untuk melakukan perubahan dalam arti fisik, perubahan ini disebut dengan revolusi total. Revolusi total di Indonesia dilatarbelakangi dua faktor. Faktor pertama, yaitu lamanya bangsa Indonesia dijajah mengakibatkan bangsa ini kehilangan segala-galanya. Tidak hanya kekayaan sumber daya alam bangsa dan negara yang dikeruk habis, tetapi bangsa ini juga mengalami krisis sumber daya manusia yang sangat akut, sehingga ia menjadi tidak berdaya melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Faktor kedua, berkaitan dengan'mengakarnya sistem feodalisme di Indonesia. Sistem ini telah ada sebelum masuknya penjajah ke Indonesia dan berlangsung sampai bangsa ini terjajah bahkan sampai sekarang sistem feodalisme merupakan benih yang menyuburkan mental perbudakan bagi bangsa

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 43.

dan sekaligus merupakan pembuka peluang masuknya imperialisme barat.¹³

Menurut Sartono Kartodirjo, revolusi Indonesia adalah proses politik yang penuh dengan konflik antar golongan, pemberontakan terhadap peristiwa yang ada, di samping itu juga merupakan masa pergolakan yang ditandai oleh serobotan, gedoran, pendaulatan di samping sebagai masa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Begitu juga dengan perjuangan Mohamad Roem seorang pahlawan nasional Indonesia di awal kemerdekaan.

H. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakuakn dalam rangka mengumpulkan data- data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif,. Penggunaan jenis metode kualitatif

¹³ Alber Doni Koesoemo, "Menuju Indonesia yang Merdeka dan Sosialis", Jurnal Basi, No. 01, (januari 2001), h. 60.

adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. Kedalaman ini yang mencirikhaskan metode kualitatif sekaligus sebagai faktor unggulannya. Seperti fenomena gunung es dimana yang Nampak dipermukaan hanya kecil, tetapi yang berada di bawahnya justru yang besar dan kuat.¹⁴

b. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, artifacts. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, angka, cerita, gambar, artifacts dan bukan berupa angka

¹⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 1.

hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi. Terdapat 3 jenis metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam (*indepth*) dengan menggunakan pertanyaan open-ended. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan.
- b. Data yang diperoleh melalui pengamatan (*observation*), data yang diperoleh berupa gambaran yang ada dilapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain.
- c. Data yang diperoleh dari dokumen berupa material tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi. Ada juga dokumen yang berupa audiovisual.¹⁵

3. Teknik Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, Berpedoman kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten Fakultas Syariah 2016.

¹⁵ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 108.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁶

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun penelitian ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Lexy I Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PIT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 248.

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Biografi Singkat Mohamad Roem, yang terdiri dari: Latar Belakang Kelahiran dan Keluarga Mohamad Roem, Latar Belakang Pendidikan dan Karya- karya Mohamad Roem.

BAB III Tinjauan teoritis tentang Pemikiran Perpolitikan di Indonesia, yang terdiri dari: Pengertian, Konsep, Sistem dan Perkembangan politik, Tokoh-tokoh politik Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan dan Sistem Politik Indonesia.

BAB IV Pemikiran Politik Mohamad Roem Dalam Kontelasi Perpolitikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan (1945-1957), yang terdiri dari: Dasar pemikiran politik Mohamad Roem dalam kontelasi perpolitikan di Indonesia pasca kemerdekaan (1945-1957), Peran pemikiran politik Mohamad Roem dalam kontelasi perpolitikan di Indonesia pasca kemerdekaan (1945-1957).

BAB V, yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

